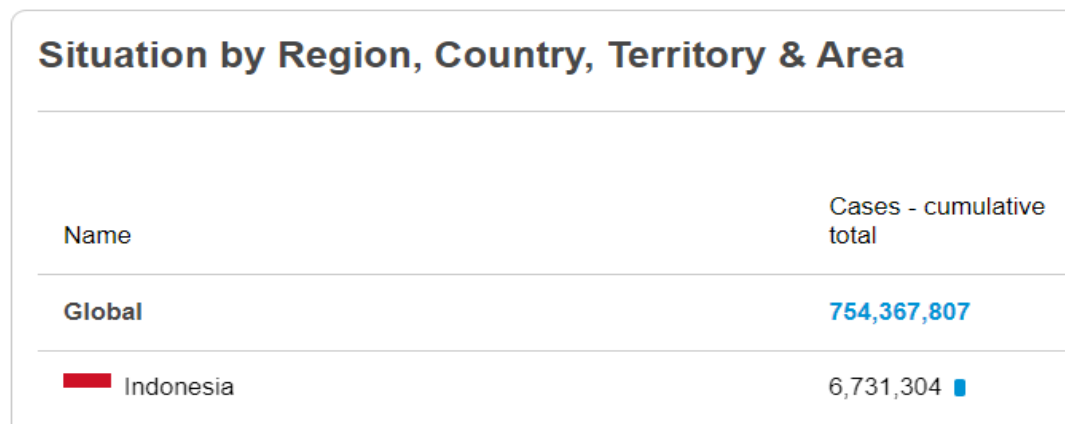


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tahun 2020 menjadi tahun darurat kesehatan internasional pasalnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pernyataan bahwa terdapat penyebaran virus yang kemudian disebut sebagai virus corona atau COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19 (WHO, 2020). COVID-19 adalah penyakit menular dari jenis coronavirus yang baru ditemukan. Wabah virus ini dimulai dari Kota Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019 dan resmi di nyatakan sebagai pandemi global pada 11 maret 2020 (WHO, 2020).



The image shows a screenshot of a table titled "Situation by Region, Country, Territory & Area". The table has two columns: "Name" and "Cases - cumulative total". The first row is "Global" with a value of 754,367,807. The second row is "Indonesia" with a value of 6,731,304. A small red square is next to the Indonesia entry.

Name	Cases - cumulative total
Global	754,367,807
Indonesia	6,731,304

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Covid-19 di Dunia dan Indonesia.

Sumber : <https://covid19.who.int/table>

Gambar 1.1 merupakan data total kasus Covid-19 yang terjadi secara global yaitu sebanyak 754.367.807 kasus, dan di Indonesia sendiri total terjadi 6.731.304 kasus Covid-19. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 2 Maret 2020 yang di derita oleh dua Warga Negara Indonesia (WNI) berdomisili di Depok usai melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemudian, Kemenkes mengatakan langsung melakukan observasi terhadap penderita COVID-19 selama 2-3 hari (Kemenkes, 2020).

Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi COVID-19. Menteri Kesehatan RI Tahun 2020, Dr. dr. Terawan Agus memimpin pertemuan *Video-Conference* bersama para Menteri Kesehatan ASEAN untuk membahas peningkatan kerja sama sektor Kesehatan ASEAN dalam penanggulangan COVID-19. Pertemuan itu menghasilkan komitmen dan kesepakatan untuk terus melakukan pertukaran data dan informasi perkembangan COVID-19 di negara ASEAN guna melakukan koordinasi *contact tracing* dan penyelidikan kasus secara bilateral dan regional. Menteri Kesehatan dr. Terawan menambahkan pentingnya kerja sama dalam peningkatan kapasitas dan penyediaan obat dan alat Kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 (Kemenkes, 2020). Pada kesempatan lain, Kementerian Kesehatan RI jalin kerja sama khusus dengan Pemerintah Jepang di bidang Kesehatan. Pada kesepakatan kerja sama ini, Pemerintah Jepang telah memberikan hibah alat-alat kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 di Indonesia (Kemenkes, 2020).

Di dalam negeri, Kementerian Kesehatan telah berupaya mempercepat pelaksanaan *tracing*, *testing*, dan *treatment* (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien COVID-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Kemudian, Pemerintah pusat telah mengaktifkan "Klaster Nasional Penanggulangan Bencana" untuk memperkuat penanggulangan pandemi COVID-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan

Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini (Kemenko PMK, 2020). Menko PMK menjelaskan aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan berbagai pihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan Lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, militer, pihak swasta, organisasi non pemerintah maupun masyarakat luas (Kemenko PMK, 2020).

Namun, setelah satu tahun virus COVID-19 di Indonesia tepatnya pada tahun 2021, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkapkan permasalahan dalam penanggulangan COVID-19. IDI menilai penanggulangan wabah COVID-19 masih lemah dalam hal implementasi pencegahan seperti *screening test*, *tracing* dan *tracking* dan masyarakat masih kurang patuh menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kemudian, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. Adib Khumaidi, SpOT. menambahkan kondisi kapasitas tenaga Kesehatan juga terbatas meskipun sudah ada peningkatan tata laksana kasus, namun ruang rawat pasien masih terdapat keterbatasan. Lebih lanjut Dr. Adib menambahkan secara garis besar, setidaknya terdapat 4 permasalahan pokok dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia, yaitu: Sinergitas regulasi sistem Kesehatan nasional masih lemah, ketidaksiapan sistem Kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19, ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri serta ketidaksiapan, kurangnya kesadaran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 (liputan6.com, 2021). Pernyataan diatas didukung fakta banyaknya tenaga Kesehatan yang gugur. Tim mitigasi IDI mengumumkan sekitar 718 tenaga Kesehatan meninggal dunia karena terpapar COVID-19 selama 2020-2021 (Tribunnews.com, 2021).

Mengingat semakin tinggi kasus COVID-19, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 pada 13 Maret 2020 di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang di ketuai oleh Letjen

TNI (Purn) Dr. Doni Monardo dan bersinergi antar kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Salah satu Lembaga negara yang ikut bersinergi adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, presiden menginstruksikan kepada TNI untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan TNI dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat. Kemudian bersama dengan Kepolisian melakukan kegiatan patrol penerapan protokol kesehatan di masyarakat serta melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Tabel Positivity Rate Hasil Lab COVID-19

Tanggal	Jumlah Orang di Test	Orang Positif Harian	Orang Negatif Harian	Positivity Rate Kasus Baru Harian	Total Spesimen di Test	Positif	Negatif	Positivity Rate Spesimen Harian
25/12/2020	10.882	1.881	9.001	17,3%	12.981	3.867	9.114	29,8%
24/12/2020	18.471	1.899	16.572	10,3%	20.883	5.119	15.764	24,5%
23/12/2020	19.341	2.070	17.271	10,7%	21.881	5.089	16.792	23,3%
22/12/2020	15.524	1.652	13.872	10,6%	18.364	4.284	14.080	23,3%
21/12/2020	17.312	2.028	15.284	11,7%	19.709	4.368	15.341	22,2%
20/12/2020	8.314	1.151	7.163	13,8%	10.298	2.265	8.033	22,0%
19/12/2020	12.812	1.311	11.501	10,2%	14.905	3.535	11.370	23,7%
18/12/2020	18.100	1.772	16.328	9,8%	21.044	4.292	16.752	20,4%
17/12/2020	21.021	1.952	19.069	9,3%	24.343	4.999	19.344	20,5%
16/12/2020	19.211	1.888	17.323	9,8%	21.754	4.951	16.803	22,8%
15/12/2020	16.123	1.675	14.448	10,4%	20.013	4.117	15.896	20,6%

**Tabel 1.2 Tabel Akumulasi Pasien Positif COVID-19 Wilayah DKI Jakarta periode Tahun 2020**

**Sumber: corona.jakarta.go.id**

Sesuai dengan Inpres tersebut, Panglima TNI secara tertulis melakukan gelar kekuatan dengan mengerahkan 27.866 Babinsa, 1.768 Babinpotmar dan 102 Babinpotdirga di 7 Provinsi di Jawa-Bali dalam

melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro. Di samping itu, TNI juga telah membantu pemerintah dalam melaksanakan *tracing* COVID-19 di tengah masyarakat dengan menyiapkan tenaga Kesehatan TNI sebagai vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh Presiden. Selain itu, TNI juga telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa *coolbox* yang telah didistribusikan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) TNI di 7 Provinsi yang menjadi titik PPKM berskala mikro (Kompas, 2021).

Di wilayah Jakarta, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 yang di ketuai oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dan diwakilkan oleh Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta, Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Panglima Komando Armada I, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta, Kepala Staf Garnisun Tetap I/Jakarta, Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kerja sama lainnya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan TNI adalah dengan berkoordinasi mengenai RS Darurat COVID-19, dimana pemerintah DKI Jakarta telah menyediakan RSD Wisma Atlet yang di pimpin oleh Mayjen TNI Budiman sedangkan untuk mendukung Langkah pemerintah daerah, TNI menyediakan 109 RS darurat sebagai bagian dari peran TNI di Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 (DPR, 2021).

Perkembangan bencana COVID-19 sebagai bencana nasional yang mendorong pelibatan TNI dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia menjadi sebuah praktik kerjasama sipil – militer di Indonesia. Pelibatan TNI ini juga sejalan dengan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. TNI memiliki salah satu strategi yang sudah mandarah daging di dalam

tubuh yaitu Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta). Sishankamrata merupakan sistem yang disusun berdasarkan falsafah Undang-Undang Dasar dengan tujuan mewujudkan ketahanan Nasional Indonesia (Kompas.com, 2022). Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Maka dari itu, dalam menghadapi permasalahan diatas, idealnya dapat dilakukan sebuah cara yang tepat sehingga penanganan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dapat sukses dijalankan. Dalam hal ini pemerintah sudah melaksanakan kerja sama sipil-militer sebagai salah satu percepatan penanggulangan COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kerja Sama Sipil-Militer dalam Penanggulangan COVID-19 dengan Penerapan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

## **1.2 Fokus dan Subfokus**

### **1.2.1 Fokus**

Penelitian ini berfokus kepada kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Kolaborasi sipil-militer tersebut terwujud di dalam gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dimana gugus tugas tersebut dikepalai sipil yaitu oleh gubernur DKI Jakarta dan beberapa wakilnya merupakan militer yaitu panglima komandi TNI Darat, Laut dan Udara yang berada di Jakarta. Gugus tugas tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Satuan Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah

dibentuk dan juga diketuai oleh Letjen TNI (Purn) Dr. Doni Monardo. Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet juga menjadi lokus penelitian ini, dimana RSD tersebut di ketuai oleh militer anggota aktif TNI dan personel kesehatan RSD Wisma Atlet sebagian besar merupakan warga sipil.

Kerjasama sipil-militer yang terjadi dalam ketiga organisasi tersebut dianalisa dengan berbagai macam teori pertahanan, kolaborasi dan strategi sishankamrata sebagai pisau analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Beberapa hal tersebutlah yang menjadi fokus dalam penelitian ini

### **1.2.2 Sub Fokus**

Dari fokus penelitian yang sudah dijelaskan tentang kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan pandemi COVID-19 maka penulis membatasi sub fokus penelitian ini yang diantaranya:

- a. Analisa kerjasama Sipil-Militer dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- b. Analisa faktor yang mempengaruhi kerja sama penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- c. Analisa penerapan Sishankamrata dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet

### **1.3 Rumusan Masalah**

Setelah satu tahun virus COVID-19 di Indonesia penanggulangan wabah COVID-19 dinilai masih lemah dalam hal implementasi pencegahan seperti *screening test*, *tracing* dan *tracking* serta masyarakat masih kurang patuh menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Kondisi kapasitas tenaga kesehatan juga terbatas meskipun sudah ada peningkatan tata laksana kasus, namun ruang rawat pasien masih ter-dapat keterbatasan. Sinergitas regulasi sistem Kesehatan nasional masih lemah, ketidaksiapan sistem Kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19,

ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri serta ketidaksiapan, kurangnya kesadaran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Berapa masalah tersebut terjadi dalam skala nasional di Indonesia. Namun belum ada data maupun penelitian yang menemukan kaitan antara permasalahan tersebut dengan kolaborasi sipil-militer di lapangan. Dalam penelitian ini DKI Jakarta diambil sebagai lokus penelitian, karena dinilai sebagai epicentrum dan memiliki keberagaman populasi masyarakat yang ada di DKI Jakarta.

Berlandaskan kepada Inpres No. 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati / wali kota dengan mengerahkan kekuatan TNI dalam melakukan pengawasan pelaksanaan protokol Kesehatan di masyarakat. Inpres tersebut dilanjutkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, dimana Panglima Kodim Jayakarta, Panglima Koarmada RI Kawasan Barat dan Panglima Komando Operasi Angkatan Udara 1 menjadi wakil ketua gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 provinsi DKI Jakarta. Kedua dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan kerjasama dan kolaborasi antara sipil-militer dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan, bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Kemudian dengan dasar hukum diatas maka terjadinya sebuah hubungan kerjasama dan kolaborasi Civil-Militer. TNI sendiri memiliki sebuah strategi yang telah mandarah daging yaitu Sishankamrata, sehingga menjadi tepat apabila Analisa sipil-militer ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan strategi Sishankamrata sebagai pisau analisis untuk melihat masalah, an-

caman, maupun solusi yang dapat ditemukan dalam permasalahan hubungan Sipil-militer dalam penanggulangan COVID-19, khususnya di RSDC DKI Jakarta. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai fakta lapangan penanggulangan COVID-19 dan Analisa-analisa yang dilakukan dengan berdasar kepada teori-teori kemiliteran dan hubungan sipil-militer. Maka Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

- a. Bagaimana kerjasama Sipil-Militer dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- b. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerja sama penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- c. Bagaimana penerapan Sishankamrata dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setelah penelitian diarahkan kepada fokus dan sub fokus beserta rumusan masalahnya, selanjutnya adalah menentukan tujuan penelitian itu sendiri. Tujuan penelitian merupakan upaya dalam penelitian untuk memperoleh jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Dengan demikian, tujuan penelitian dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Menganalisis kerjasama Sipil-Militer dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- b. Mengidentifikasi Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerja sama penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.
- c. Menganalisis penerapan Sishankamrata dalam penanggulangan COVID-19 di RSDC Wisma Atlet.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian akan mampu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, ilmuwan mengembangkan aspek teori, maupun para praktisi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan, mekanisme dan prosedur Kerja Sama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Covid-19 dengan Penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus: Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet, Daerah khusus ibukota Jakarta), demikian juga halnya dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek, yaitu dalam aspek teoritis dan praktis.

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ide dan pemikiran bagi penelitian tentang keberhasilan Kerja Sama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Covid-19 dengan Penerapan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Studi Kasus: Rumah Sakit Darurat Covid Wisma Atlet, Daerah khusus ibukota Jakarta). Di samping itu, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah pustaka teoritik dan konseptual tentang kerjasama sipil–militer dalam penanggulangan bencana COVID-19.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan di Kementerian Pertahanan dalam mengambil langkah strategis merumuskan kebijakan kerjasama antara sipil-militer dalam membangun Sishankamrata sebagai upaya pertahanan menghadapi *Bioterrorism*, *Biological Weapon* dan *Biological Warfare* di masa yang akan datang. Dengan demikian kerja sama sipil-militer dapat menjadi salah satu elemen penting dari sinergitas yang mengedepankan Kerjasama kelembagaan. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat pula menjadi bagian bagi kalangan akademisi di bidang manajemen bencana.